

Analisis Implementasi Program Roots Indonesia dalam Penuntasan Isu Perundungan: Studi Kasus pada Beberapa Satuan Pendidikan di DKI Jakarta

Analysis of Implementation of the Indonesian Roots Program in Resolving Bullying Issues: A Case Study in Several Schools in DKI Jakarta

doi: 10.24832/jpnk.v9i1.4556

Kadek Jeny Femila Devi, Hamka, Ratri Istanisa

Politeknik STIA LAN Jakarta - Indonesia

Email: kadekjenyfemiladevi@gmail.com

Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan
Vol. 9, Nomor 1, Juni 2024

ISSN-p: 2460-8300

ISSN-e: 2528-4339

Naskah diterima: 11-12-2023

Naskah disetujui: 29-05-2024

Terbit: 30 Juni 2024

Abstract: *This research aims to find out how the Indonesian Roots Program is implemented in DKI Jakarta, the factors that hinder it based on the Van Meter and Van Horn implementation indicators, and strategies to maximize the results of implementing the program. The research subjects were six schools implementing the Roots Program in 2021 and still implementing the Roots Program in 2022. The research results show that the implementation of the Roots Program in DKI Jakarta has not run optimally. The lack of optimal implementation of the program is influenced by program planning, schools' commitment, regeneration of facilitator teachers, a synergy between local government and other stakeholders, supervision of the program implementation process, and the influence of economic, social, and political conditions. Strategies that can be implemented to maximize the implementation of the Roots Program in DKI Jakarta are through strategic planning adjustments, increasing the involvement of program stakeholders, socializing the flexibility of funding sources, utilizing the Merdeka Belajar platform for facilitator teachers, holding empathy classes, building an anti-violence culture by involving parents, initiating a movement to reject bullying, and build an inclusive classroom atmosphere. In conclusion, in terms of public policy performance indicators, the implementation of the Indonesian Roots Program has not yet run optimally and strategy implementation is needed so that it has an impact on resolving bullying cases in schools.*

Keywords: *policy implementation, education policy, Roots Program, bullying in schools*

Abstrak: *Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi Program Roots Indonesia di DKI Jakarta, faktor-faktor yang menghambat berdasarkan indikator implementasi Van Meter dan Van Horn, dan strategi memaksimalkan hasil implementasi program tersebut. Subjek penelitian adalah enam satuan pendidikan pelaksana Program Roots tahun 2021 dan masih melaksanakan Program Roots pada tahun 2022. Hasil penelitian menunjukkan implementasi Program Roots di DKI Jakarta belum berjalan optimal. Belum optimalnya pelaksanaan program tersebut*

dipengaruhi oleh faktor perencanaan program, komitmen satuan pendidikan, regenerasi fasilitator guru, sinergi antara pemerintah daerah dengan pemangku kepentingan lainnya, pengawasan terhadap implementasi program, dan kondisi sosial. Strategi yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan implementasi Program Roots di DKI Jakarta adalah melalui penyesuaian renstra, meningkatkan keterlibatan para pemangku kepentingan program, sosialisasi fleksibilitas sumber pendanaan, pemanfaatan platform merdeka mengajar bagi fasilitator guru, mengadakan kelas empati, membangun budaya anti kekerasan dengan melibatkan orang tua, menginisiasi gerakan untuk berani menolak perundungan, dan membangun suasana kelas yang inklusif. Kesimpulan, ditinjau dari indikator kinerja kebijakan publik implementasi Program Roots Indonesia belum sepenuhnya berjalan optimal dan diperlukan strategi implementasi sehingga berdampak pada penuntasan kasus perundungan pada satuan pendidikan.

Kata kunci: *implementasi kebijakan, kebijakan pendidikan, Program Roots, perundungan di sekolah*

PENDAHULUAN

Kekerasan telah diakui sebagai masalah yang serius oleh beberapa lembaga internasional. Pada Mei 2021, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dalam *World Health Assembly ke-74* mengadopsi resolusi baru untuk mengakhiri kekerasan kepada anak-anak (UNICEF, 2021). Resolusi ini menekankan peran pemerintah dan pemangku kepentingan mewujudkan *zero violence* dan menciptakan ruang yang aman bagi anak termasuk pada satuan pendidikan.

Salah satu bentuk kekerasan yang kerap dialami oleh anak adalah perundungan. Perundungan atau *bullying* merupakan kekerasan fisik atau kekerasan psikis yang dilakukan secara berulang karena ketimpangan relasi kuasa.

National Centre Against Bullying (NCAB) mengungkapkan beberapa jenis perundungan antara lain perundungan fisik, perundungan verbal, perundungan relasional, dan perundungan siber (National Centre Against Bullying, 2017). Tindakan yang termasuk perundungan fisik antara lain memukul, menendang, mencekik, menampar, meninju, menggigit, meludahi, menginjak, atau perilaku lain yang membuat korban merasa sakit serta merusak barang-barang milik korban. Sementara

perundungan verbal merupakan tindakan kekerasan yang berhubungan dengan kata-kata yang dikeluarkan secara verbal seperti menghina, memfitnah, memaki, dan memberikan julukan yang tidak menyenangkan. Jenis perundungan lainnya adalah perundungan relasional, yaitu perundungan yang dilakukan melalui pengucilan, pengabaian, pengecualian, penyingkiran, atau tindakan lainnya yang menyebabkan korban terasingkan dari lingkungan sosial (National Centre Against Bullying, 2017). Jenis perundungan terakhir adalah perundungan dunia maya atau perundungan siber, yaitu perilaku agresif berulang yang bertujuan untuk menakuti, mempermalukan, dan membuat marah korban. Contohnya menyebarkan kebohongan, mengirim pesan bernada ancaman, meniru atau mengatasnamakan seseorang, dan aktivitas lainnya yang dilakukan di media elektronik (UNICEF, 2020).

Perundungan terjadi baik pada negara maju maupun berkembang, tetapi kasus perundungan berisiko terjadi lebih tinggi pada negara berkembang (UNICEF, 2018b). Studi di negara barat menyatakan bahwa 4-9% remaja terlibat perundungan, dan 9-25% siswa pernah mengalami perundungan (Purba & Septiyan,

2023). Pada negara-negara di Amerika Latin, tingkat prevalensi perundungan mencapai 40-50% dimana remaja Peru dan Kolombia menyatakan bahwa mereka kerap menindas orang lain. Sementara di Asia Tenggara, studi menunjukkan perilaku intimidasi cukup sering terjadi, dan tingkat prevalensi perundungan berada di angka 10% (Sittichai & Smith, 2015).

Kondisi yang sama juga dialami Indonesia dimana satuan pendidikan sebagai rumah kedua bagi anak seharusnya dapat membangun lingkungan pendidikan yang aman dan nyaman (Kemendikbudristek, 2021). Sebanyak 41% pelajar Indonesia berusia 15 tahun dilaporkan mengalami perundungan setidaknya beberapa kali dalam sebulan (OECD, 2019). Bahkan berdasarkan hasil Asesmen Nasional, sebanyak 36,31% peserta didik berpotensi mengalami perundungan di satuan pendidikan (Kemendikbudristek, 2023c).

Perundungan di satuan pendidikan telah dikaitkan dengan berbagai gangguan psikologis dan masalah kesehatan emosional (Juwita & Kustanti, 2020). Perundungan dapat menyebabkan depresi, kecemasan, hingga bunuh diri (Takizawa, Maughan, & Arseneault, 2014). Perundungan juga memberikan dampak yang buruk pada kesehatan, ekonomi, relasi sosial, dan perilaku ilegal lainnya (Wolke, Copeland, Angold, & Costello, 2013). Selain berdampak buruk pada korban, perundungan juga berimplikasi pada kebiasaan buruk para pelaku antara lain sering berkelahi, berbohong, merampok, mengonsumsi minuman keras dan obat-obatan, serta aktivitas seksual di luar pernikahan (Angold, Erkanli, Copeland, Goodman, Fisher, & Costello, 2012).

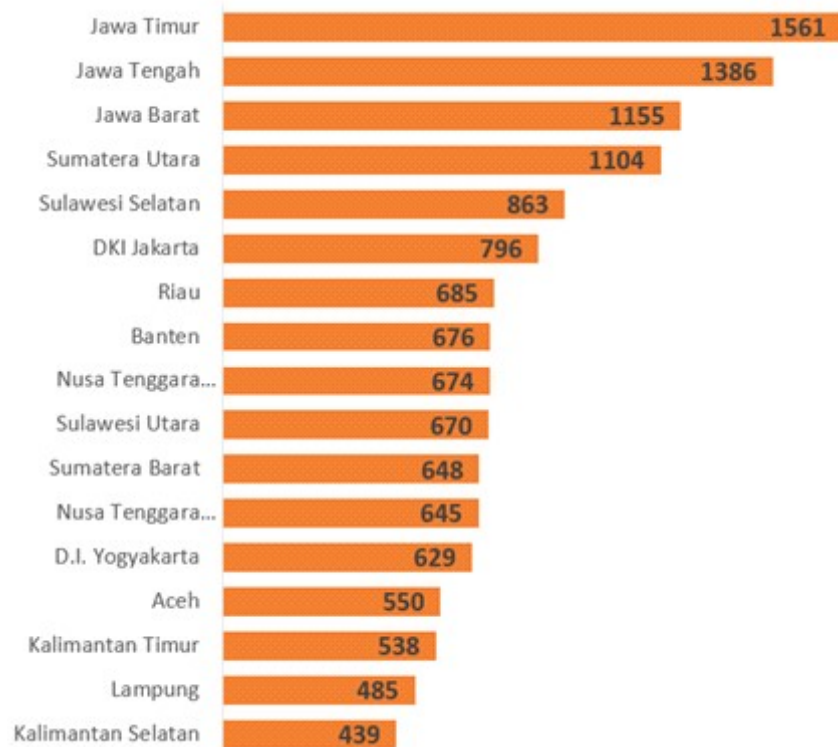
Perundungan yang dilakukan seorang anak terjadi akibat faktor lingkungan sekolah, keluarga, media, hubungan teman sebaya, dan kondisi sosial dan budaya (Lestari, 2021). Lingkungan sekolah yang tidak aman serta tanpa pengawasan menjadi pemicu siswa melakukan perundungan. Tidak jauh berbeda, kondisi

keluarga yang tidak sehat dapat memicu depresi dan stres yang membuat anak melampiaskan perlakuan buruk yang dialami di rumah kepada orang lain. Usia remaja adalah usia pencarian jati diri dimana anak mudah terpengaruh dan mudah meniru tindakan negatif yang ditampilkan di media. Begitupun hubungan dengan teman sebaya yang berperilaku tidak baik akan memberikan pengaruh negatif kepada anak (Fitriani & Hastuti, 2017). Faktor penyebab perundungan lainnya adalah kondisi sosial dan budaya yang buruk sehingga memengaruhi anak berperilaku kasar hingga memicu terjadinya perundungan.

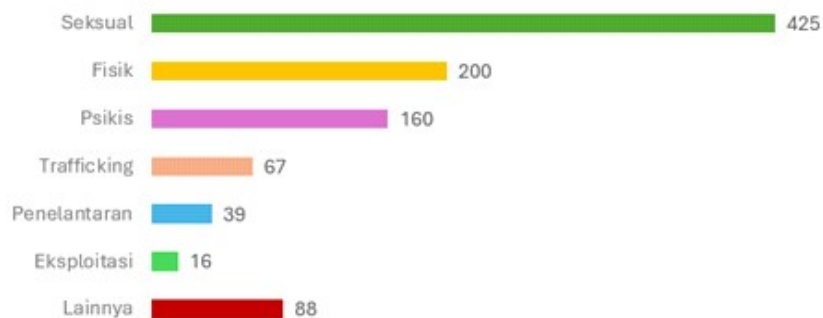
Salah satu provinsi yang memiliki angka kasus kekerasan tertinggi adalah DKI Jakarta. Data Simfoni KemenPPPA pada tahun 2022 memperlihatkan terdapat 796 laporan kasus kekerasan pada anak yang terjadi di DKI Jakarta (KemenPPPA, 2022).

Meskipun masih terdapat provinsi lain yang memiliki angka kasus kekerasan tertinggi, angka korban kekerasan DKI Jakarta mencapai 3,4 yang berarti hampir 3 dari 10.000 anak di DKI Jakarta menjadi korban kekerasan. Angka korban ini jauh lebih tinggi dari provinsi lain dengan tingkat kekerasan tertinggi seperti Jawa Timur (1,8), Jawa Tengah (1,7), Jawa Barat (0,8), dan Sumatera Utara (2,6) (KemenPPPA, 2022).

Kasus kekerasan tertinggi yang dialami oleh anak di DKI Jakarta adalah kekerasan seksual, diikuti oleh kekerasan fisik, dan kekerasan psikis seperti terlihat pada Gambar 2 (KemenPPPA, 2022). Kondisi ini sangat mengkhawatirkan karena DKI Jakarta adalah provinsi dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tertinggi di Indonesia tahun 2022 yaitu sebesar 81,65 (Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik DKI Jakarta, 2022). Fenomena ini memperlihatkan bahwa tingginya tingkat pendidikan yang menjadi salah satu indikator dalam IPM, tidak memberikan jaminan tingginya pemahaman terhadap kekerasan ataupun perundungan. Hal ini terbukti dengan masih maraknya kasus



Gambar 1 Jumlah Kasus Kekerasan pada Anak yang Dilaporkan Tahun 2022
Sumber: KemenPPPA, 2022



Gambar 2 Jenis Kekerasan yang Terjadi pada Anak di DKI Jakarta Tahun 2022
Sumber: KemenPPPA, 2022

kekerasan dan perundungan yang terjadi di DKI Jakarta.

Salah satu upaya Kemendikbudristek dalam memerangi perundungan adalah dengan memperkuat regulasi yang dapat mencegah dan menangani kekerasan di satuan pendidikan melalui Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (PPKSP). Peraturan ini memiliki peran penting dalam memenuhi amanat Undang-Undang

Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah terkait Perlindungan Khusus Bagi Anak (Kemendikbudristek, 2023d). Salah satu yang menjadi fokus dalam regulasi ini adalah upaya pencegahan dan penanganan kekerasan yang melibatkan semua warga satuan pendidikan dan pemerintah daerah (Kemendikbudristek, 2023b).

Upaya pencegahan perundungan dengan pelibatan aktif dari warga satuan pendidikan dilakukan melalui implementasi program berbasis sekolah yang seringkali efektif mengurangi

perilaku perundungan sebesar 20-23%, dan menurunkan angka korban perundungan sebesar 17-20% (Menesini & Salmivalli, 2017). Salah satu program berbasis sekolah yang melibatkan peran aktif siswa adalah Program Roots.

Program Roots merupakan model intervensi anti perundungan berbiaya rendah yang berfokus pada upaya menciptakan iklim yang aman di sekolah dengan pelibatan aktif peran siswa sebagai agen perubahan (Bowes, Aryani, Ohan, Haryanti, Winarna, Arsianto *et al.*, 2019; UNICEF, 2017b). Program Roots lebih awal diimplementasikan pada 56 satuan pendidikan dengan 24.191 siswa di Amerika Serikat (Paluck, Shepherd, & Aronow, 2016). Program ini memiliki kelebihan karena dapat diimplementasikan dengan sumber daya yang terbatas, dan memanfaatkan jejaring sosial untuk memaksimalkan dampak dari implementasi program. Hasil dari implementasi Program Roots di Amerika memperlihatkan angka konflik antarsiswa berkurang hingga 30% selama satu tahun (Paluck *et al.*, 2016).

Program Roots hadir di Indonesia tahun 2016 dan diuji coba pada 2 satuan pendidikan di Provinsi Sulawesi Selatan dan 4 satuan pendidikan di Provinsi Jawa Tengah yang melibatkan 6.338 siswa. Pada tahun 2019 dilakukan uji coba tahap kedua di 12 satuan pendidikan di Papua Barat dengan melibatkan 3.101 siswa (Keysinaya & Nuraeni, 2022). Berdasarkan uji coba yang dilakukan di Sulawesi Selatan, terjadi penurunan perilaku perundungan hingga 29% (UNICEF, 2017a). Sementara di Jawa Tengah terjadi peningkatan jumlah laporan korban karena meningkatnya kesadaran warga satuan pendidikan terkait konsep perundungan (UNICEF, 2018a). Penurunan juga terjadi di Provinsi Papua Barat dengan penurunan angka perundungan di kisaran 20-30%.

Keberhasilan Program Roots mampu menurunkan angka konflik antarsiswa sebesar 30% di Amerika Serikat dan menurunkan perilaku perundungan sebesar 29% di Sulawesi Selatan.

Berdasarkan data tersebut, Kemendikbudristek berkolaborasi dengan UNICEF dan mitra lainnya mengimplementasikan Program Roots secara nasional pada lebih dari 1800 satuan pendidikan (Pusat Penguatan Karakter, 2021a).

Tahap implementasi merupakan tahapan yang penting dalam proses kebijakan publik (Wijayanti & Jannah, 2019). Walaupun kebijakan telah direncanakan dengan baik, tujuan dari kebijakan tidak akan tercapai jika tidak diimplementasikan dengan benar (Mubarok, Zauhar, Setyowati, & Suryadi, 2020). Implementasi kebijakan merupakan pelaksanaan keputusan dari undang-undang, peraturan, dan keputusan yang keberhasilannya dapat diukur dari proses implementasi (Ramadan, Wardhani, & Malta, 2023). Aspek penting dalam proses implementasi adalah mengidentifikasi masalah dan peluang yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan. Van Meter dan Van Horn melihat, terdapat enam variabel yang memengaruhi keberhasilan dan kegagalan suatu implementasi kebijakan. Variabel tersebut antara lain 1) standar dan tujuan kebijakan, 2) sumber daya, 3) karakteristik organisasi pelaksana, 4) komunikasi antarorganisasi pelaksana, 5) sikap para pelaksana, dan 6) lingkungan sosial, ekonomi, dan politik (Pramono, 2022).

Penelitian yang dilakukan Nursasari (2017) menyatakan bahwa faktor pendukung dalam penerapan antisipasi perundungan antara lain dukungan dari orang tua, komite, komitmen dari warga sekolah, dan finansial. Sementara hambatannya antara lain kurangnya dukungan dari dinas pendidikan dan keterbatasan waktu (Nursasari, 2017). Untuk mendorong sekolah melakukan intervensi dalam program perundungan diperlukan pelatihan kepada ekosistem sekolah (Faridah, 2020). Kedua penelitian ini menunjukkan hasil bahwa komitmen dari pelaksana dan dukungan dari dinas pendidikan, orang tua, dan sumber daya sangat mendukung program anti perundungan yang diimplementasikan di sekolah.

Telah banyak penelitian terkait program perundungan, tetapi belum ada yang secara spesifik membahas keberhasilan implementasi program berdasarkan proses kebijakannya. Keberhasilan implementasi program umumnya dikaji berdasarkan proses implementasi (perspektif proses) dan hasil yang dicapai (perspektif hasil). Pada perspektif proses, suatu program dikatakan berhasil jika pelaksanaannya sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang dibuat oleh pembuat program. Menilik dari perspektif hasil, program dikatakan berhasil ketika membawa dampak sesuai dengan yang diharapkan (Tresiana & Duadji, 2021).

Penelitian terkait Program Roots telah dilakukan untuk melihat peran Program Roots dalam upaya penuntasan perundungan di level satuan pendidikan. Hasil yang ditunjukkan adalah semakin tinggi pengaruh teman sebaya, semakin tinggi perilaku perundungan. Hal ini menjelaskan bahwa peran agen perubahan akan sangat berpengaruh dalam implementasi Program Roots (Sari & Budiman, 2021). Selain peran agen perubahan, peran guru, organisasi siswa, dan role model juga sangat penting dalam menumbuhkan perilaku empati untuk menghentikan perundungan (Halim & Djuwita, 2018).

Sejak Program Roots diimplementasikan di DKI Jakarta tahun 2021 hingga saat ini, beberapa satuan pendidikan masih menghadapi kendala dalam mengimplementasikan program. Dalam survei awal yang digunakan untuk memetakan implementasi Program Roots, tercatat dari 28 satuan pendidikan yang mengisi survei, hanya 6 satuan pendidikan yang melaksanakan kembali Program Roots di tahun 2022. Kondisi ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh Konsultan UNICEF yang mendampingi pelaksanaan Program Roots:

“komitmen sekolah yang rendah dalam implementasi dan kendala teknis maupun nonteknis saat bimtek guru menjadi kendala pelaksanaan Program Roots” (2 Oktober 2024).

Berdasarkan penelusuran penelitian terdahulu terkait Program Roots Anti Perundungan, ditemukan bahwa belum terdapat penelitian yang secara spesifik dan terperinci meneliti mengenai aspek-aspek kebijakan publik, khususnya dikaitkan dengan tahapan kebijakan publikasi dalam proses implementasi Program Roots. Penelitian terdahulu lebih menekankan pada aspek psikologi dan hasil kuantitatif dari dampak implementasi Program Roots dalam proyek piloting yang dilaksanakan oleh UNICEF. Sementara dalam penelitian ini, konsep implementasi kebijakan digunakan dalam melihat proses implementasi program, serta faktor-faktor yang memengaruhi implementasi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan strategi dalam mengatasi faktor penghambat implementasi kebijakan Program Roots Anti Perundungan pada satuan pendidikan khususnya di DKI Jakarta serta dapat digunakan sebagai bahan perbaikan implementasi Program Roots pada tahun-tahun mendatang.

Rendahnya angka satuan pendidikan yang mengimplementasikan kembali Program Roots di tahun 2022 mengindikasikan bahwa implementasi Program Roots pada satuan pendidikan di DKI Jakarta masih mengalami kendala dan hambatan seperti terlihat pada Gambar 3. Sementara itu, keberlanjutan program ini merupakan salah satu poin yang menjadi indikator keberhasilan upaya pencegahan perundungan yang sedang dilaksanakan Kemendikbudristek (Kemendikbudristek, 2021).

Model implementasi Van Meter dan Van Horn merupakan model implementasi yang memandang bahwa suatu proses implementasi merupakan tindakan yang dilakukan oleh implementor yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah ditentukan (Syahrudin, 2019). Model implementasi dianggap dapat mewakili permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini dan dapat digunakan untuk menganalisis implementasi Program Roots. Terdapat enam faktor atau variabel yang



Gambar 3 Daftar Kendala yang Dihadapi Sekolah Selama Melaksanakan Roots

Sumber: Pusat Penguatan Karakter, 2023

memengaruhi kinerja kebijakan publik menurut Van Meter dan Van Horn (Tabel 1).

Tabel 1 Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi

1. Standar dan Tujuan Kebijakan
 - 1a. Pedoman pelaksanaan program
 - 1b. Indikator keberhasilan program
2. Sumber Daya
 - 2a. Sumber daya finansial
 - 2b. Sumber daya manusia
3. Komunikasi antar organisasi dan Aktivitas Pelaksana
 - 3a. Kejelasan informasi
 - 3b. Ketepatan komunikasi antar pelaksana
 - 3c. Konsistensi informasi
4. Karakteristik Pelaksana
 - 4a. Prosedur Operasional Standar
5. Sikap Pelaksana
 - 5a. Pemahaman terkait tujuan kebijakan
 - 5b. Tanggapan pelaksana
6. Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik
 - 6a. Kondisi social
 - 6b. Kondisi ekonomi
 - 6c. Kondisi Politik

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penghambat implementasi Program Roots pada satuan pendidikan di DKI Jakarta dengan menggunakan model implementasi Van Meter dan Van Horn. Selain itu, penelitian ini bertujuan mengetahui strategi yang diterapkan untuk mengatasi faktor penghambat implementasi Program Roots agar dapat mengoptimalkan implementasinya pada satuan pendidikan di DKI Jakarta.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena yang ada, mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat proses implementasi Program Roots pada satuan pendidikan dalam hal ini adalah proses implementasi Program Roots di DKI Jakarta.

Sumber data pada penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui angket/kuisisioner dan wawancara terhadap informan. Sementara data sekunder yang digunakan diperoleh dari studi dokumentasi.

Angket/kuesioner digunakan untuk identifikasi awal implementasi Program Roots di satuan pendidikan. Untuk memperoleh data satuan pendidikan yang melaksanakan Program Roots kembali pada tahun 2022, dilakukan survei terkait keberlanjutan Program Roots. Dari 46 satuan pendidikan pelaksana Program Roots di Jakarta, sebanyak 28 satuan pendidikan mengisi survei, tetapi hanya enam satuan pendidikan sebagai obyek studi ini yang menyatakan melaksanakan kembali Program Roots. Enam satuan pendidikan tersebut adalah:

- 1) SMP Islam Al Azhar 1
- 2) SMA Negeri 50 Jakarta
- 3) SMAS Labschool Jakarta
- 4) SMKS Paramitha Jakarta
- 5) SMKS Islam PB Soedirman 1 Jakarta
- 6) SMK Negeri 63 Jakarta.

Selanjutnya dilakukan wawancara kepada satuan pendidikan yang melaksanakan kembali Program Roots berdasarkan data hasil kuesioner. Wawancara dilakukan agar dapat menggali informasi yang diharapkan, dan mendapatkan data dengan minimum bias dan maksimum efisiensi (Hakim, 2013).

Wawancara dilakukan kepada informan penelitian yang memiliki pengalaman dan kompetensi yang relevan terhadap tema penelitian (Sidiq & Choiri, 2019). Informan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Ketua Tim Anti Perundungan, Pusat Penguatan Karakter (Puspeka) Kemendikbudristek sebagai informan yang memahami dan terlibat dalam perencanaan, implementasi, dan pengawasan Program Roots Kemendikbudristek.
- 2) Perwakilan UNICEF untuk implementasi Program Roots Indonesia yang mengetahui proses implementasi sejak program ini dilaksanakan di Indonesia. Selain itu UNICEF juga bertanggung jawab dalam menyiapkan bahan ajar serta melatih fasilitator nasional.
- 3) Dinas pendidikan Provinsi DKI Jakarta sebagai pihak yang berperan penting dalam

mendukung implementasi Program Roots di DKI Jakarta.

- 4) Enam satuan pendidikan yang melaksanakan kembali Program Roots tahun 2022, meliputi kepala sekolah, fasilitator guru, siswa agen perubahan, dan siswa nonagen perubahan yang merasakan dampak Program Roots.

Teknik pengumpulan data lainnya yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi atau pengumpulan data yang bersumber dari dokumen yang dapat memberikan informasi pendukung terhadap suatu peristiwa. Studi dokumentasi pada penelitian ini dilakukan pada dokumen kebijakan, laporan, buku, paparan kebijakan, dokumen perencanaan, dan lainnya.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model analisis data Miles dan Huberman yaitu meliputi pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan verifikasi (Fauziyah & Arif, 2021).

Reduksi data pada hasil dilakukan dengan menentukan batasan dan fokus penelitian, serta memilih hal-hal pokok, membuat intisari, dan mengeluarkan data-data yang tidak diperlukan. Komparasi data dilakukan dengan melihat perbedaan pelaksanaan Program Roots tahun 2021 dan 2022 saat satuan pendidikan masih mendapatkan bantuan pemerintah dan saat tidak mendapatkan bantuan pemerintah. Selanjutnya, informasi yang diperoleh disajikan dalam bentuk uraian teks, tabel, diagram, dan gambar untuk mempermudah dalam melakukan penarikan kesimpulan.

Penarikan kesimpulan dilakukan secara terus-menerus selama penelitian di lapangan dan bersifat sementara, hingga diperoleh kesimpulan akhir dari hasil penelitian. Semua kesimpulan yang diperoleh akan diverifikasi selama penelitian berlangsung melalui tinjauan ulang catatan lapangan, diskusi, dan langkah-langkah lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Program Roots di DKI

Jakarta

Penelitian mengambil lokus pada satuan pendidikan di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Penelitian untuk mengetahui secara lebih dalam bagaimana implementasi Program Roots serta hambatan yang ditemui selama pelaksanaan program.

Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, pelajar menduduki peringkat kedua jumlah korban kekerasan tertinggi di DKI Jakarta (Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik DKI Jakarta, 2022). Menurut model implementasi Van Meter dan Van Horn, implementasi kebijakan publik berjalan secara linear antara kebijakan, pelaksana, dan kinerja dari pelaksana kebijakan publik. Berikut gambaran implementasi Program Roots berdasarkan indikator implementasi kebijakan Van Meter Van Horn:

Standar dan Tujuan Kebijakan

Indikator standar dan tujuan kebijakan sejauh mana tercapai adalah dilihat melalui dokumen seperti peraturan dan pedoman program (Rolifola & Fitriyani, 2023).

Standar dan tujuan Program Roots telah tertuang dalam Renstra Kemendikbudristek. Salah satu indikator kinerja program untuk meningkatnya internalisasi nilai penguatan karakter adalah persentase provinsi dan kabupaten/kota mengimplementasikan materi penuntasan perundungan (Kemendikbudristek, 2022).

Pada level pemerintah daerah, upaya pencegahan dan penanganan perundungan telah tertuang dalam 1) Keputusan Gubernur Nomor 1042 tahun 2018 tentang Kegiatan Strategis Daerah, 2) Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Melihat bahwa pemerintah daerah telah memiliki standar untuk pencegahan dan penanganan kekerasan, sudah seharusnya

upaya ini juga tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Namun, pada Renstra tahun 2017 s.d. 2022 belum tertuang upaya pencegahan dan penanganan kekerasan dalam rencana program/kegiatan dinas pendidikan.

Selain berdasarkan dokumen regulasi dan pedoman program, ukuran-ukuran dasar dan sasaran-sasaran kebijakan juga didukung oleh pernyataan dari Konsultan UNICEF yang menyampaikan antara lain:

“Puspeka melakukan bimbingan teknis untuk guru di sekolah dan melakukan pendampingan. Sekolah mengimplementasikan Program Roots dengan membentuk agen perubahan dan melaksanakan minimal 10 modul. UNICEF melakukan asistensi teknis pelaksanaan Program Roots untuk Puspeka. UNICEF mengkoordinasikan fasilitator dalam bimbingan teknis roots.” (2 Oktober 2024)

Pada level satuan pendidikan, telah ditindaklanjuti indikator keberhasilan dari Program Roots, serta telah disusun petunjuk teknis pelaksanaan di satuan pendidikan (Tabel 2).

Sumber Daya

Keberhasilan pelaksanaan program bergantung pada pengetahuan atau keterampilan memanfaatkan sumber daya yang tersedia (bt Sani & Idris, 2018). Sumber daya dapat berupa sumber daya finansial dan sumber daya manusia.

Tabel 3 menjelaskan sumber dana implementasi Program Roots. Selama implementasi Program Roots tahun 2021, satuan pendidikan mendapatkan dana bantuan pemerintah. Pada tahun 2022 satuan pendidikan diharapkan mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan Program Roots melalui dana BOS ataupun sumber pendanaan lainnya. Hal ini berdampak pada jumlah sekolah di Jakarta yang melanjutkan Program Roots di tahun 2022 menurun drastis. Berdasarkan hasil survei keberlanjutan Program Roots yang dilakukan oleh Puspeka, 50% satuan

Tabel 2 Tindak Lanjut Satuan Pendidikan Berdasarkan Indikator Keberhasilan Program Roots

Sekolah	Mengikuti Bimtek Roots	Keterlibatan Warga Sekolah	Fasilitator Guru yang Terlatih	Pertemuan Roots 10 Modul	Terbentuk Agen Perubahan	Perubahan Pemahaman
Sekolah A	Ya	Ya	Ya	10	Ya	Ya
Sekolah B	Ya	Ya	Ya	15	Ya	Ya
Sekolah C	Ya	Ya	Ya	15	Ya	Ya
Sekolah D	Ya	Ya	Ya	15	Ya	Ya
Sekolah E	Ya	Ya	Ya	10	Ya	Ya
Sekolah F	Ya	Ya	Ya	15	Ya	Ya

Sumber: Angket Implementasi Program Roots

Tabel 3 Sumber Pendanaan Program Roots pada Satuan Pendidikan

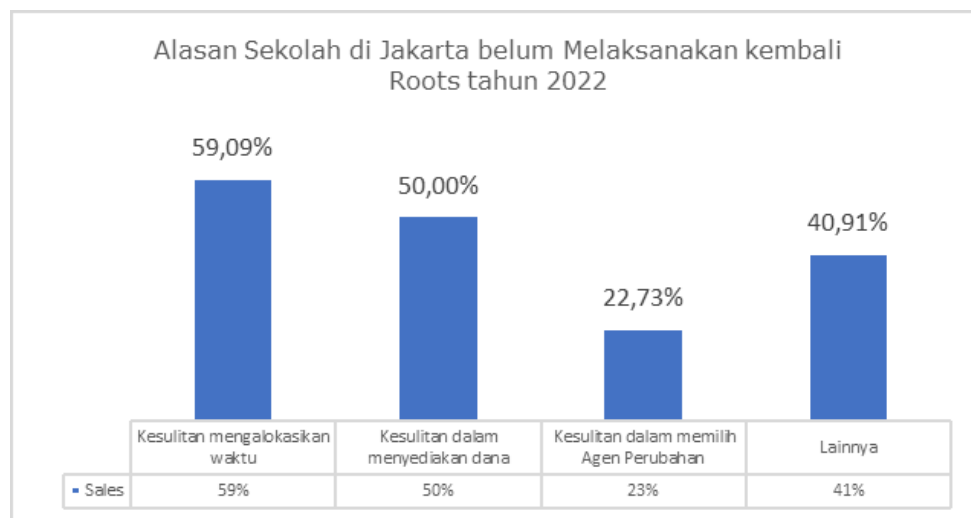
Satuan Pendidikan	Status	Pendanaan	
		2021	2022
Sekolah A	Negeri	Banpem	BOS
Sekolah B	Swasta	Banpem	Sekolah, Yayasan
Sekolah C	Swasta	Banpem	Banpem
Sekolah D	Swasta	Banpem	Swadaya, Yayasan
Sekolah E	Swasta	Banpem	Banpem
Sekolah F	Swasta	Banpem	Banpem

Sumber: Angket Implementasi Program Roots

pendidikan di Jakarta menyatakan kendala sekolah tidak melaksanakan Program Roots kembali adalah karena biaya (Gambar 4).

Satuan pendidikan yang melaksanakan kembali Program Roots di tahun 2022 tidak mengalami kendala dalam pendanaan karena

menggunakan sumber pendanaan lainnya yaitu dari BOS. Sementara itu, sumber pendanaan untuk sekolah swasta dapat diperoleh melalui dana swadaya ataupun yayasan. Bahkan, terdapat satuan pendidikan yang tidak menggunakan dana, namun tetap melaksanakan



Gambar 4 Survei Keberlanjutan Program Roots Tahun 2021 dan 2022

Sumber: Pusat Penguatan Karakter, 2023

Program Roots dengan mengurangi beberapa aktivitas. Sekolah memanfaatkan hasil karya dan bahan-bahan tahun lalu yang masih dapat digunakan kembali, seperti yang diungkapkan oleh informan 8:

“Sejauh ini belum menggunakan anggaran karena anggaran yang kemarin masih bisa digunakan. Kami masih memakai produk di tahun pertama, mendokumentasikan, memberi barang kenang-kenangan, bahan-bahannya dari dana bantuan pemerintah, jadi untuk tahun selanjutnya karya-karya tersebut masih bisa digunakan. Seharusnya ada kegiatan besar tapi tahun ini kami hanya sosialisasi dan membuat stan.” (21 Juni 2024).

Sementara untuk sekolah yang masih mendapatkan bantuan pemerintah mengemukakan bahwa tidak mengalami kendala dalam pembiayaan Program Roots untuk tahun selanjutnya, seperti yang disampaikan oleh informan 12:

“Pendanaan dari kemendikbudristek, besarnya kurang lebih 10 juta rupiah. Berdasarkan informasi Ibu Kepala Sekolah, walaupun nanti tidak mendapat bantuan, program ini akan tetap dilaksanakan setiap

tahunnya. Kalau tahun lalu kami memiliki subsidi dari sekolah, karena dengan biaya 10 juta saja belum mencukupi, sehingga kami subsidi dengan biaya kegiatan sekolah.” (21 Juni 2023).

Selain dukungan anggaran, sumber daya manusia memiliki peran penting dalam keberhasilan implementasi Program Roots. Tabel 4 menjelaskan kriteria guru yang terpilih sebagai fasilitator dalam Program Roots. Fasilitator guru telah memiliki kualifikasi sesuai dengan kriteria yang diharapkan, seperti yang diungkapkan oleh informan 13:

“Fasilitator guru cukup bagus, penyampaian materinya dilakukan secara bertahap sehingga bisa dipahami. Kalau kami melihat ada perundungan di kelas, kami langsung melapor, baik yang dirundung maupun yang merundung dipanggil. Kebetulan di setiap kelas ada siswa agen perubahan.” (21 Juni 2023)

Selain itu, kemampuan SDM juga terlihat dari hasil tes awal dan tes akhir saat Bimtek Fasilitator Guru Roots. Tabel 5 memperlihatkan hampir semua fasilitator guru mengalami peningkatan pengetahuan setelah memperoleh pelatihan.

Tabel 4 Kriteria Fasilitator Guru sesuai dengan Pedoman Teknis

Kriteria	Sekolah A	Sekolah B	Sekolah C	Sekolah D	Sekolah E	Sekolah F
Memiliki Jabatan di Sekolah	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Berusia 25 s.d. 45	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bersahabat	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pengalaman Pembina Kegiatan	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Menguasai Bahasa Indonesia yang Baik	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Mampu Berdiskusi dengan Baik	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Mampu Mengatur Waktu	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Menguasai Program Roots	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Sumber: Angket Implementasi Program Roots

Tabel 5 Hasil Tes Awal dan Tes Akhir Fasilitator Guru Program Roots

No	Satuan Pendidikan	Fasilitator Guru	Nilai Tes Awal	Nilai Tes Akhir
1	Sekolah A	Fasilitator Guru 1	85	90
2	Sekolah A	Fasilitator Guru 2	70	75
3	Sekolah B	Fasilitator Guru 3	85	85
4	Sekolah B	Fasilitator Guru 4	75	80
5	Sekolah C	Fasilitator Guru 5	50	85
6	Sekolah C	Fasilitator Guru 6	75	75
7	Sekolah D	Fasilitator Guru 7	70	95
8	Sekolah D	Fasilitator Guru 8	100	100
9	Sekolah E	Fasilitator Guru 9	20	85
10	Sekolah E	Fasilitator Guru 10	40	65
11	Sekolah F	Fasilitator Guru 11	75	100
12	Sekolah F	Fasilitator Guru 12	65	60
Rata-rata			67,5	83,0

Sumber: Pretes dan Postes Fasilitator Guru Roots

Berdasarkan informasi yang dikumpulkan, dapat disimpulkan bahwa sumber daya finansial bukan merupakan kendala bagi satuan pendidikan yang telah melaksanakan Program Roots. Satuan pendidikan melakukan berbagai alternatif pembiayaan mulai dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS), pembiayaan dari yayasan, atau melalui swadaya. Satuan pendidikan negeri umumnya menggunakan dana BOS sebagai sumber operasionalnya. Satuan pendidikan swasta menggunakan dana dari yayasan dan juga swadaya. Keterbatasan dana juga membuat satuan pendidikan melaksanakan Program Roots secara sederhana dengan memangkas beberapa kegiatan atau menggabungkan dengan kegiatan lain. Dari segi SDM, semua fasilitator guru telah sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Mereka telah mendapatkan bimbingan dengan hasil tes awal dan tes akhir mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

Komunikasi Antarorganisasi Pelaksana

Komunikasi antarorganisasi pelaksana menitikberatkan pada ketepatan dan konsistensi komunikasi dan pemahaman para pelaksana terkait tujuan program (Rolifola & Fitriyani, 2023).

Komunikasi antarpelaksana dalam proses implementasi Program Roots sudah cukup baik, mulai dari UNICEF kepada Puspeka, kemudian antara Puspeka kepada pemerintah daerah, dan juga pada satuan pendidikan. Para pelaksana telah mendapatkan informasi yang sama karena baik pemda, maupun satuan pendidikan telah mendapatkan sosialisasi terkait Program Roots. Sosialisasi ini bertujuan memberikan pemahaman sebelum program tersebut diimplementasikan di satuan pendidikan masing-masing.

Selain memastikan ketepatan dan kejelasan informasi yang disampaikan terkait dengan Program Roots, keseragaman informasi juga terlihat sejak sosialisasi di dinas pendidikan, pemberian materi pada fasilitator guru, hingga pelatihan kepada agen perubahan. Hal ini disampaikan oleh informan 9:

"Komunikasi berjalan lancar. Pada awalnya dilakukan secara daring, menggunakan WA Grup, sebelumnya ada pertemuan Roots sehingga menggunakan WAG dan Zoom. Terkadang juga dilakukan tatap muka langsung. Pada tahun 2022 lebih sering dilakukan secara tatap muka karena sudah tidak ada pandemi *Covid-19*." (21 Juni 2023)

Berdasarkan hasil wawancara, dinas pendidikan mengharapkan kolaborasi yang

semakin aktif antara Puspeka sebagai penyelenggara program dengan dinas pendidikan. Walaupun kolaborasi telah berjalan dengan cukup baik, masih terdapat beberapa potensi kolaborasi yang belum terfasilitasi dengan baik. Masih terdapat beberapa program pencegahan dan penanganan kekerasan atau perundungan yang juga dilaksanakan oleh satuan pendidikan selain Program Roots. Program tersebut merupakan inisiasi dari pemerintah daerah yaitu Program Laboratorium Pancasila, dan inisiasi dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Sehingga terdapat satuan pendidikan yang melaksanakan 2-3 program dengan tujuan yang sama.

Karakteristik Organisasi Pelaksana

Kinerja implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh karakteristik dan kesesuaian agen pelaksananya yang dapat tergambar pada bagaimana Prosedur Operasional Standar (POS) yang tertuang dalam kebijakan dan karakteristik organisasi (Tuti, Murod, El Adawiyah, & Patrianti, 2020). POS merupakan panduan yang memastikan pekerjaan dan aktivitas operasional organisasi dapat berjalan dengan baik (Sailendra & Annie, 2015). POS dalam implementasi Program Roots tertuang dalam petunjuk pelaksanaan program yang diterbitkan oleh Puspeka (Gambar 4). Adanya panduan program sangatlah penting sebagaimana yang tercermin dalam wawancara yang disampaikan oleh informan 17 di bawah ini:

“Selama melaksanakan program (Roots) kami diberi panduan berupa rekaman, dan juga bimtek. Dari bahan bimtek kami jadikan sebagai acuan. Ada juga produk yang dibuat sebagai acuan. Bahan yang dibuat di lapangan adalah berdasarkan panduan dari Puspeka. Jika tidak ada panduan kami pasti akan mengalami kesulitan informasi” (23 Juni 2024)

Pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta telah memiliki POS yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor



Gambar 4 Buku Petunjuk Pelaksanaan Program Roots Indonesia

86 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan bagi Peserta Didik di Satuan Pendidikan dan Lingkungan Satuan Pendidikan. Pos ini mengatur mekanisme pencegahan dan penanggulangan kekerasan, serta keterlibatan dari ekosistem pendidikan. Namun demikian, dari sisi pengawasan secara hierarkis terhadap proses implementasi kebijakan belum cukup optimal. DKI Jakarta belum memaksimalkan peran Gugus Tugas Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan untuk secara aktif terlibat dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan.

Sikap Pelaksana

Sikap pelaksana sangat memengaruhi proses implementasi kebijakan, antara lain pemahaman pelaksana terhadap suatu kebijakan, penerimaan atau penolakan pelaksana terhadap program, dan intensitas respon pelaksana (Olin, Kase, & Toda, 2021).

Dalam implementasi Program Roots, semua pelaksana kebijakan telah mendapatkan informasi dan pemahaman yang sama terkait tujuan dan mekanisme pelaksanaan Program Roots. Pemerintah daerah pun menunjukkan dukungan yang positif terhadap implementasi program ini mengingat pencegahan dan penanganan perundungan merupakan salah satu program prioritas dan tertuang dalam dokumen perencanaan Provinsi DKI Jakarta, seperti yang diungkapkan oleh informan dari Dinas Pendidikan:

“(Program Roots) sebenarnya sudah bagus, karena memang kami melakukan kegiatan-kegiatan terkait anti perundungan. Kami menyambut baik pihak eksternal yang ingin membantu. Kami juga menginisiasi program-program, kami juga berkomitmen pada sekolah ramah anak. Untuk program-program kami sudah banyak diinisiasi oleh pimpinan yang sekarang.” (27 September 2023)

Hal yang perlu ditingkatkan adalah keterlibatan dari pemangku kepentingan lain yang seharusnya dapat berkontribusi besar dalam upaya pencegahan dan penanganan perundungan. Namun, hal tersebut belum sepenuhnya terwujud dalam implementasi Program Roots.

Sikap penerimaan juga belum sepenuhnya tercermin pada level satuan pendidikan seperti terlihat pada Gambar 5. Beberapa satuan pendidikan tampak belum berkomitmen dalam mengimplementasikan Program Roots sebagai salah satu upaya pencegahan perundungan. Satuan pendidikan memilih tidak melaksanakan kembali Program Roots ketika tidak lagi mendapatkan bantuan pendanaan dari pemerintah.

Sikap penerimaan tidak hanya ditunjukkan oleh warga satuan pendidikan, tetapi juga oleh komite dan orang tua. Dukungan dan penerimaan

dari warga sekolah, orang tua, dan masyarakat sangat penting karena program ini akan berdampak baik secara langsung maupun tidak langsung.

Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Van Meter dan Van Horn memiliki pandangan bahwa lingkungan eksternal memiliki pengaruh penting dalam pelaksanaan kebijakan. Kondisi ekonomi yang tidak kondusif sangat memengaruhi implementasi Program Roots, seperti ketidakmampuan sekolah dalam membiayai operasional program, pandemi *Covid-19* yang tidak hanya membuat anggaran Dinas Pendidikan dialihkan pada bidang kesehatan juga meningkatkan risiko terjadinya perundungan secara daring karena penggunaan gawai yang cukup intens oleh peserta didik (Bagja, 2021).

Anggapan sosial lain yang turut memengaruhi implementasi Program Roots adalah pandangan sosial bahwa beberapa tindakan perundungan adalah hal yang lazim dalam pertemanan. Candaan dianggap cara untuk mendekatkan diri dan fasilitator guru juga beranggapan beberapa aduan siswa terkesan berlebihan setelah mendapatkan sosialisasi Program Roots, seperti yang diungkapkan oleh informan 15:



Gambar 5 Alasan Sekolah Tidak Melaksanakan Program Roots Kembali di Tahun 2022

Sumber: Angket Implementasi Program Roots

"Menurut saya antara bercanda dan melakukan perundungan itu tidak terlalu berbeda, banyak yang melaporkan (kasus perundungan), padahal sebenarnya mereka hanya bercanda, tetapi setelah sosialisasi (Program Roots) yang melihat langsung melapor bahwa ini kasus perundungan." (22 Juni 2024)

Kondisi politik juga sangat memengaruhi implementasi program. Program Roots menjadi sangat dinamis karena keberlanjutan program ini sangat dipengaruhi oleh kondisi politik atau keberpihakan para pembuat kebijakan terhadap suatu isu.

Strategi Implementasi Program Roots di DKI Jakarta

Berdasarkan hasil analisis implementasi Program Roots di DKI Jakarta dapat diidentifikasi beberapa hambatan yang menjadi kendala. Dengan demikian diperlukan strategi dalam upaya memaksimalkan hasil implementasi Program Roots di DKI Jakarta. Strategi tersebut diuraikan dalam penjelasan berikut.

Optimalisasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan melalui Penyesuaian Rencana Strategis Dinas Pendidikan

Rencana strategis merupakan acuan dalam mengimplementasikan suatu program atau kegiatan. Perencanaan Strategis yang matang membuat suatu program dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien (Maria & Hadiyanto, 2021). Agar Dinas Pendidikan dapat melakukan intervensi dan penguatan terhadap implementasi Program Roots, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Renstra Dinas Pendidikan. Dengan ini diharapkan Program Roots memiliki landasan yang kuat sejak tahap perencanaan sehingga dapat menjadi pedoman bagi satuan pendidikan dalam menyusun rencana kerja sekolah.

Sosialisasi Fleksibilitas Penggunaan Dana BOS untuk Program Roots

Salah satu hambatan satuan pendidikan dalam mengimplementasikan Program Roots adalah keterbatasan dana yang dimiliki untuk menjalankan program ini. Untuk mengatasi hal tersebut Kemendikbudristek telah memberikan fleksibilitas penggunaan dana BOS sehingga dapat digunakan untuk membiayai program pencegahan dan penanganan kekerasan yang dilakukan oleh satuan pendidikan. Fleksibilitas tersebut diatur dalam Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan.

Dinas pendidikan dapat memberikan kebijakan sekolah untuk mengusulkan pergeseran atau perubahan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) jika ingin mengalokasikan dana untuk program pencegahan dan penanganan kekerasan ini. Permasalahan selanjutnya yang dihadapi adalah informasi ini belum diketahui sepenuhnya oleh satuan pendidikan, sehingga perlu dilakukan sosialisasi oleh dinas pendidikan karena kewenangan pengesahan usulan perubahan RKAS sekolah ada pada dinas pendidikan. Untuk mendukung agar informasi ini dapat tersampaikan secara masif, sosialisasi ini dapat dilakukan dengan beragam media, seperti sosial media, surat dinas resmi, buku panduan Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS), serta dicantumkan dalam menu tutorial di aplikasi ARKAS.

Pemanfaatan Platform Merdeka Mengajar dan Learning Management System untuk Pelatihan Fasilitator Guru

Keberhasilan implementasi Program Roots sangat bergantung pada fasilitator guru yang sebelumnya telah mendapat pelatihan dari Puspeka untuk memfasilitasi pelaksanaan program Roots di satuan pendidikan termasuk melatih para agen perubahan. Namun, kendala yang dihadapi adalah pelatihan fasilitator guru

hanya dilakukan satu kali pada satuan pendidikan, sehingga ketika terjadi pergantian fasilitator guru atau regenerasi, guru yang baru tidak mendapatkan ilmu dengan lengkap pada saat pelatihan.

Untuk memudahkan guru mendapatkan pelatihan tentang cara menyampaikan Program Roots kepada satuan pendidikan dapat dilakukan melalui aplikasi baik itu Platform Merdeka Mengajar (PMM) atau *Learning Management System (LMS)*. PMM merupakan platform teknologi yang disediakan untuk mempermudah guru mengajar dan belajar, menyediakan pelatihan untuk peningkatan kompetensi, dan dapat diakses di mana saja dengan menggunakan gawai. Tutorial cara menyampaikan Program Roots dapat disampaikan dalam bentuk tulisan atau video ajar yang bisa diakses dalam LMS atau PMM.

Penanaman Budaya Anti Kekerasan oleh Orang Tua

Salah satu hal penting yang mendukung implementasi Program Roots dan pencegahan perundungan adalah menciptakan lingkungan sosial yang sehat antara anak dengan orang tua (Borualogo, Kusdiyati, & Wahyudi, 2022). Keterlibatan orang tua sangat diperlukan agar anak dapat terbuka dan orang tua bisa memberikan contoh teladan bagi anak untuk bersikap dalam lingkungan pergaulan.

Beberapa hal penting yang dapat diajarkan orang tua untuk menanamkan budaya anti kekerasan antara lain:

- 1) Menjadi teladan bagi anak baik di sekolah maupun di rumah.
- 2) Menunjukkan kehangatan dan perhatian kepada anak
- 3) Menetapkan batasan tegas mengenai perilaku yang tidak boleh dilakukan oleh anak
- 4) Konsisten menggunakan tindakan nonfisik saat mendidik atau menasehati anak
- 5) Mengajarkan disiplin positif, yaitu penerapan disiplin tanpa hukuman dan pemberian hadiah.

Pelibatan Satuan Tugas dan Tim

Pencegahan dan Penanganan Kekerasan

Program pencegahan dan penanganan kekerasan tidak dapat dilakukan hanya oleh satuan pendidikan tetapi perlu sinergi antara para pemangku kepentingan. Salah satu amanat dalam Permendikbudristek 46/2023 adalah satuan pendidikan membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) dan pemerintah daerah membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan untuk memastikan adanya respon cepat ketika terjadi kekerasan di satuan pendidikan. Pada Desember 2023 sudah terbentuk 56,14% TPPK di DKI Jakarta (Kemendikbudristek, 2023a). Walaupun Satgas DKI Jakarta belum terbentuk, tetapi Jakarta telah membentuk gugus tugas pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan bagi peserta didik yang diatur dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 826/2020.

Salah satu strategi untuk memastikan pencegahan dan penanganan kekerasan berjalan secara optimal adalah melalui pelibatan instansi dan organisasi yang bergerak pada perlindungan anak untuk bergabung dalam satuan tugas atau terlibat secara aktif dalam pemenuhan layanan kasus kekerasan. Tabel 6 mengilustrasikan layanan yang dapat diberikan institusi terkait terhadap kasus kekerasan terhadap anak.

Gerakan Berani Laporkan Kekerasan

Salah satu hambatan dalam penanganan perundungan adalah banyaknya kasus perundungan yang tidak dilaporkan, baik kepada orang tua, guru, maupun pihak berwajib. Korban perundungan seringkali enggan untuk melaporkan kekerasan atau perundungan yang dialami karena malu dan tidak mendapat respon yang seharusnya (Kamila, Laksono, & Karwati, 2022).

Selain korban yang enggan untuk melapor, peran orang yang berada di sekitar kejadian perundungan atau saksi (*bystander*) juga perlu dilibatkan dalam pengawasan kasus perundungan di sekolah. Saksi yang semula bersikap

Tabel 6 Pemetaan Sumber Dukungan Layanan Kasus Kekerasan

Sumber Dukungan	Instansi/Lembaga Dukungan	Peranan/Layanan yang Diberikan
Rumah aman bagi anak korban kekerasan	Rumah aman rujukan dari P2TP2A	- Memberikan pelayanan perlindungan bagi anak korban kekerasan - Mengintegrasikan pelayanan perlindungan - Mempermudah koordinasi pelayanan perlindungan (Pergub 48/2018)
Jaminan kesehatan dan pelayanan korban kekerasan anak	Dinas Kesehatan	Korban kekerasan perempuan dan anak mendapatkan pelayanan penuh secara gratis (Pergub DKI 169/2022)
Pemeriksaan fisik	Puskesmas/fasilitas pelayanan kesehatan di seluruh Indonesia (untuk warga DKI Jakarta dan WNI yang mengalami tindak kekerasan di wilayah DKI Jakarta)	- Pemeriksaan fisik dan/atau visum anak korban kekerasan (Pergub 30/2021) - Perlindungan keselamatan dan pelayanan bagi semua orang termasuk anak-anak (Permenkes 43/19)
Psikososial dan pendamping sosial	Dinas Sosial	- Pelayanan rehabilitasi sosial anak korban tindak kekerasan - Pendampingan korban tindak kekerasan (Renstra Dinas Sosial DKI Jakarta 2023-2026)
Bantuan Hukum	LBH, LBH Apik	Bantuan hukum untuk korban dan pelaku kekerasan
Kesehatan mental dan pemeriksaan psikologis	Puskesmas, Sahabat Jiwa	Layanan kesehatan mental psikolog atau psikiater (https://sahabatjiwa-dinkes.jakarta.go.id/)
Edukasi kesehatan mental	- Yayasan Pulih - Yayasan Iam Okay - SEJIWA	- Edukasi terkait pentingnya kesehatan mental - Pemulihan trauma dan penguatan psikososial bagi penanganan kekerasan pada kelompok rentan
Unit layanan disabilitas	Unit Layanan Disabilitas	- Mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusi tingkat dasar dan menengah - Menyediakan unit layanan informasi dan tindak cepat anak penyandang disabilitas korban kekerasan - Memberikan perlindungan khusus terhadap anak penyandang disabilitas - Menyediakan aman (Perda Provinsi DKI Jakarta 4/2022)
Keberlanjutan pendidikan	Dinas Pendidikan	Memastikan keberlanjutan Pendidikan bagi korban dan pelaku perundungan

Sosialisasi upaya pencegahan dan penanganan perundungan di satuan pendidik	Dinas Pendidikan	Menyosialisasikan kebijakan, program, materi, dan informasi terkait pencegahan dan penanganan perundungan
Penyelenggaraan kesejahteraan social bagi pelaku anak	Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) DKI Jakarta	Memberikan pelayanan, pembinaan, dan rehabilitasi social pada pelaku anak yang berhadapan dengan hukum (UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak)
Advokasi, penanganan dan pendampingan kasus anak korban kekerasan termasuk perundungan	Lembaga Perlindungan Anak Indonesia	- Penerimaan pengaduan dan pendampingan bagi anak yang mengalami kekerasan dan kehilangan haknya. - Mengupayakan rehabilitasi atau pengembalian kondisi anak yang mengalami kekerasan
Layanan perlindungan anak korban kekerasan berbasis gender	UPT PPA DKI Jakarta (P2TP2A)	Pelayanan kepada korban kekerasan terhadap anak
Melaksanakan perlindungan anak baik upaya pencegahan dan penanganan kekerasan	Dinas PPAPP DKI Jakarta	- Melaksanakan perlindungan anak - Menginisiasi program dan kegiatan terkait perlindungan anak
Mencegah tindak kriminal	Aparat Keamanan	Melakukan langkah preventif mencegah tindak Kriminal anak dan remaja

Sumber: diolah peneliti dari Modul Pencegahan dan Penanganan Kekerasan

pasif ketika terjadi perundungan diharapkan dapat aktif bertindak membela korban. Dalam banyak kasus, perundungan berkembang menjadi fenomena kelompok. Dukungan dari saksi menjadi sangat penting karena peran saksi seolah memberikan penguatan diterimanya perilaku perundungan oleh teman sebaya. Sehingga sangat penting untuk menanamkan nilai moral dan empati agar saksi menunjukkan sikap keberpihakan kepada korban.

Selain perubahan paradigma pada korban dan saksi, penanganan kasus perundungan juga perlu difasilitasi dengan kanal pelaporan. Kanal pelaporan harus mudah digunakan oleh anak untuk melaporkan kasus kekerasan yang mereka

lihat atau mereka alami. Kanal pelaporan dapat disediakan dalam bentuk *online* seperti *hotline* atau melalui aplikasi formulir *online*. Selain itu, juga perlu disediakan kanal pelaporan *offline* melalui kotak pengaduan yang dipasang di tempat-tempat strategis dan rawan perundungan dan juga melalui layanan bimbingan konseling di sekolah.

Strategi di atas diharapkan mampu membantu proses pengawasan yang dilakukan satuan pendidikan. Dengan demikian, secara berkala dapat dilaporkan kepada dinas pendidikan untuk ditindaklanjuti jika kasus perundungan tidak mampu diselesaikan di tingkat satuan pendidikan.

Mengadakan Kelas Empati (*Emphaty Classes*) untuk Meningkatkan Kepedulian Siswa

Perundungan memiliki banyak dampak psikologis yang sangat memengaruhi kesehatan mental anak. Berdasarkan penelitian, rasa empati dapat berfungsi sebagai mekanisme koping (*coping mechanism*) yang efektif dalam menangani krisis mental (Sun, Vuillier, Hui, & Kogan, 2019). Mekanisme koping yang baik akan membawa seseorang mampu menangani perasaan stres, cemas, dan depresi (Septyari, Adiputra, & Devhy, 2022).

Selain berfungsi sebagai mekanisme koping, empati juga merupakan respon afektif yang dihasilkan dari memahami keadaan emosi orang lain (Lee, Cheung, Chee, & Chai, 2021). Empati dianggap sebagai perlindungan umum yang efektif melawan perundungan (Graf, Yanagida, & Spiel, 2019).

Pentingnya penanaman rasa empati pada anak dapat dibentuk dengan mengadakan kelas empati. Anak belajar untuk mendengarkan dan mengerti perasaan orang lain. Kelas empati telah diterapkan di Denmark, Finlandia, dan Rumania dan mampu mencegah perundungan pada anak-anak (Palade & Pascal, 2023). Dalam kelas empati, anak diajarkan kesadaran akan sikap empati dan sensitivitas emosional, kemampuan mendengarkan dan merespon dengan empati, perbedaan sudut pandang, dan aktivitas-aktivitas yang dapat menanamkan rasa empati dalam diri anak.

Membangun Suasana Kelas yang Positif dan Inklusif

Salah satu upaya dalam pencegahan perundungan adalah dengan menciptakan budaya sekolah yang positif dan inklusif dengan mempromosikan nilai-nilai keadilan, gotong royong, kepedulian, toleransi, dan nilai-nilai Profil Pelajar Pancasila. Gambar 6 menggambarkan nilai-nilai dalam Profil Pelajar Pancasila.



Gambar 6 Nilai/Dimensi dalam Profil Pelajar Pancasila

Sumber: Pusat Penguatan Karakter, 2021b

Membangun suasana kelas yang positif dan inklusif dapat dilakukan dengan beragam aktivitas menarik. Aktivitas tersebut antara lain dengan mengorganisir proyek kolaboratif dalam rangka mengkampanyekan anti perundungan, mengadakan pameran karya seni yang berkaitan dengan upaya pencegahan perundungan, serta ragam aktivitas lainnya yang dapat memfasilitasi kreativitas siswa dan membangun rasa kepedulian yang tinggi.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Program Roots Indonesia hadir sebagai solusi untuk menurunkan angka perundungan yang terjadi pada satuan pendidikan. Namun, implementasi Program Roots pada beberapa satuan pendidikan di Provinsi DKI Jakarta belum sepenuhnya optimal dilihat dari indikator kinerja kebijakan publik.

Selain itu, terdapat beberapa kendala yang menghambat proses implementasi program tersebut yang jika tidak diselesaikan, akan berdampak pada berkurang atau terputusnya hak pendidikan sehingga menghambat pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan amanat UUD 1945. Oleh karena itu, diperlukan strategi untuk mengoptimalkan implementasi Program Roots yang dapat dilakukan baik oleh Kemendikbudristek,

pemerintah daerah DKI Jakarta, maupun satuan pendidikan.

Saran

Provinsi DKI Jakarta menunjukkan dukungan penuh terhadap upaya pencegahan dan penanganan kekerasan dan perundungan melalui implementasi Program Roots. Namun, implementasi program tersebut masih belum optimal. Oleh karena itu, Kemendikbudristek dan daerah Provinsi DKI Jakarta perlu melakukan advokasi kebijakan agar strategi ini tersampaikan kepada para pemangku kepentingan. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan komitmen dari satuan pendidikan dalam mengimplementasikan Program Roots di DKI Jakarta. Selain itu, Melihat banyak satuan pendidikan yang tidak melaksanakan Program Roots karena terkendala biaya, perlu dilakukan advokasi bahwa satuan pendidikan dapat menggunakan dana BOS dalam pembiayaan Program Roots.

Peran orang tua menjadi hal krusial dalam upaya pencegahan dan penanganan perundungan. Oleh karena itu, orang tua perlu mendapat edukasi sehingga mereka memahami karakteristik anak yang terlibat perundungan, bagaimana membekali anak untuk berani melapor, dan memberikan pendidikan karakter agar anak tidak menjadi pelaku perundungan.

Penelitian ini hanya melihat implementasi Program Roots pada satuan pendidikan tahun 2021 dan yang melaksanakan kembali pada tahun 2022 di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak dapat dijadikan gambaran umum bagaimana implementasi Program Roots telah berjalan di wilayah-wilayah lainnya. Analisis implementasi Program Roots perlu dilakukan juga di wilayah lain khususnya wilayah dengan angka perundungan yang tinggi agar diperoleh hasil penelitian yang lebih baik terkait implementasi Program Roots di masa mendatang.

PUSTAKA ACUAN

- Angold, A., Erkanli, A., Copeland, W., Goodman, R., Fisher, P., & Costello, E. (2012). Psychiatric diagnostic interviews for children and adolescents: A comparative study. *Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry*, 51(5), 506–517. doi.org/10.1016/j.jaac.2012.02.020
- Bagja, K. (2021, July 14). *Anggaran Rp2,54 triliun di Pemprov DKI dialihkan untuk tangani covid-19*. <https://www.idxchannel.com/economics/anggaran-rp254-triliun-di-pemprov-dki-dialihkan-untuk-tangani-covid-19>.
- Borualogo, I.S., Kusdiyati, S., & Wahyudi, H. (2022). Pelajaran yang didapat dari Olweus Bullying Prevention Program dan KiVa: Review Naratif. *Buletin Psikologi*, 30(1), 1–21. doi.org/10.22146/buletinpsikologi.64929
- Bowes, L., Aryani, F., Ohan, F., Haryanti, R. H., Winarna, S., Arsianto, Y., Budiawati, H., Widowati, E., Saraswati, R., Kristianto, Y., Suryani, Y.E., Ulum, D.F., & Minnick, E. (2019). The development and pilot testing of an adolescent bullying intervention in Indonesia – The ROOTS Indonesia program. *Global Health Action*, 12(1), 1656905. doi.org/10.1080/16549716.2019.1656905
- bt Sani, N., & Idris, A.R. (2018). Implementation of Linus programme based on the model of Van Meter and Van Horn. *MOJES: Malaysian Online Journal of Educational Sciences*, 1(2), 25–36.
- Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik DKI Jakarta. (2022). *Data Statistik Sektor Pemerintah Provinsi DKI Jakarta*.

- Faridah. (2020). Pelatihan penanganan dan pencegahan perundungan bagi Kepala Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Gowa. *Jurnal Pengadi*, 1(2), 146–152.
- Fauziyah, W.E., & Arif, L. (2021). Model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn dalam tinjauan pembangunan jalan lingkar selatan (Ring Road) di Kabupaten Tuban. *Journal Publicuho*, 4(2). doi.org/10.35817/jpu.v4i2.18573
- Fitriani, W., & Hastuti, D. (2017). Pengaruh kelekatan remaja dengan ibu, ayah, dan teman sebaya terhadap kenakalan remaja di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandung. *Jurnal Ilmu Keluarga & Konsumen*, 9(3), 206–217. doi.org/10.24156/jikk.2016.9.3.206
- Graf, D., Yanagida, T., & Spiel, C. (2019). Through the magnifying glass: Empathy's differential role in preventing and promoting traditional and cyberbullying. *Computers in Human Behavior*, 96, 186–195. doi.org/10.1016/j.chb.2019.02.007
- Hakim, L.N. (2013). Ulasan Metodologi Kualitatif: Wawancara Terhadap Elit. *Jurnal Aspirasi*, 4(2), 165–172.
- Halim, C., & Djuwita, R. (2019). Action research: Pemberdayaan Bystander untuk mencegah perundungan di sekolah melalui Program Pelatihan Keterampilan Empati. *Jurnal Perkotaan*, 10(1), 77–99. doi.org/10.25170/perkotaan.v10i1.302
- Juwita, V. R., & Kustanti, E. R. (2020). Hubungan antara pemaafan dengan kesejahteraan psikologis pada korban perundungan. *Jurnal EMPATI*, 7(1), 274–282. doi.org/10.14710/empati.2018.20196
- Kamila, Y.N., Laksono, B.A., & Karwati, L. (2022). Peningkatan kepekaan pada korban bullying di lingkungan pendidikan. *Jurnal Pendidikan Modern*, 7(3), 123–127. doi.org/10.37471/jpm.v7i3.468
- Kemendikbudristek. (2021, September 29). *Sekolah aman, nyaman, dan menyenangkan tanpa perundungan*. Direktorat Sekolah Dasar, Kemendikbudristek.
- Kemendikbudristek. (2021). *Materi Program Roots Pertemuan 15: Evaluasi dan Keberlanjutan Roots*. Pusat Penguatan Karakter, Kemendikbudristek.
- Kemendikbudristek. (2022). *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024*.
- Kemendikbudristek. (2023a). *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan*.
- Kemendikbudristek. (2023b). *Urgensi PPSKP*. Pusat Penguatan Karakter, Kemendikbudristek
- Kemendikbudristek. (2023c, August). *Merdeka Belajar: Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan*.
- KemenPPPA. (2022). *Simfoni-PPA*. <https://Kekerasan.Kemenpppa.Go.Id/Ringkasan>.
- KemenPPPA. (2023). *SIMFONI-PPA*. <https://Kekerasan.Kemenpppa.Go.Id/Ringkasan>.
- Keysinaya, E.Y., & Nuraeni. (2022). Peran UNICEF Indonesia menangani perundungan di Sekolah melalui Program Roots. *Jurnal Sosial Politik*, 8(2), 207–224. doi.org/10.22219/jurnalsopol.v8i2.22258

- Lee, J., Cheung, H.S., Chee, G., & Chai, V.E. (2021). The Moderating Roles of Empathy and Attachment on the Association Between Latent Class Typologies of Bullying Involvement and Depressive and Anxiety Symptoms in Singapore. *School Mental Health*, 13(3), 518–534. doi.org/10.1007/s12310-021-09411-3
- Lestari, W.S. (2021). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Bullying di Kalangan Peserta Didik. *Sosio-Didaktika: Social Science Education Journal*, 3(2), 147–157. doi.org/10.15408/sd.v3i2.4385
- Maria, R., & Hadiyanto, H. (2021). Urgensi Perencanaan Strategis dalam Meningkatkan Pengembangan dan Mutu Pendidikan. *EDUKATIF: JURNAL ILMU PENDIDIKAN*, 3(5), 2012–2024. doi.org/10.31004/edukatif.v3i5.742
- Menesini, E., & Salmivalli, C. (2017). Bullying in schools: the state of knowledge and effective interventions. *Psychology, Health & Medicine*, 22(sup1), 240–253. doi.org/10.1080/13548506.2017.1279740
- Mubarok, S., Zauhar, S., Setyowati, E., & Suryadi, S. (2020). Policy implementation analysis: Exploration of George Edward III, Marilee S Grindle, and Mazmanian and Sabatier Theories in the Policy Analysis Triangle Framework. *Journal of Public Administration Studies*, 005(01), 33–38. doi.org/10.21776/ub.jpas.2020.005.01.7
- National Centre Against Bullying. (2017, February 18). *Types of Bullying*. <https://www.ncab.org.au/bullying-advice/bullying-for-parents/types-of-bullying/>.
- Nursasari, N. (2017). Penerapan Antisipasi Perundungan (Bullying) pada Sekolah Dasar di Kota Tenggara. *SYAMIL: Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education)*, 5(2). doi.org/10.21093/sy.v5i2.926
- OECD. (2019). *Result From PISA 2018*.
- Olin, Y.K., Kase, P., & Toda, H. (2021). The role of traditional institutions in implementing the empowerment policy of Oetulu village, Musi district, Timor Tengah Utara regency. *Journal of Governance and Accountability Studies*, 1(2), 145–161. doi.org/10.35912/jgas.v1i2.305
- Palade, T., & Pascal, E. (2023). Reducing Bullying through Empathy Training: The Effect of Teacher's Passive Presence. *Behavioral Sciences*, 13(3), 216. doi.org/10.3390/bs13030216
- Paluck, E.L., Shepherd, H., & Aronow, P.M. (2016). Changing climates of conflict: A social network experiment in 56 schools. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 113(3), 566–571. doi.org/10.1073/pnas.1514483113
- Pramono, J. (2022). *Kajian Kebijakan Publik: Analisis Implementasi dan Evaluasinya di Indonesia*. UNISRI Press.
- Purba, N.S.P., & Septiyan. (2023). The overview of bullying behavior in adolescents. *Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi*, 11(4).
- Pusat Penguatan Karakter. (2021a). *Bersama, Kita Hentikan Perundungan!* <https://cerdasberkarakter.kemdikbud.go.id/merdekadariperundungan/>.
- Pusat Penguatan Karakter. (2021b). *Profil Pelajar Pancasila*. <https://cerdasberkarakter.kemdikbud.go.id/profil-pelajar-pancasila/>.
- Pusat Penguatan Karakter. (2023). *Survei Keberlanjutan Program Roots Angkatan 2021 di Tahun 2022*.
- Ramadan, F., Wardhani, A.C., & Malta, M. (2023). Implementation of public service policies at the

- Department of Investment and Integrated one door service at Pringsewu Regency. *Adpebi International Journal of Multidisciplinary Sciences*, 2(2), 173–188. doi.org/10.54099/aijms.v2i2.471
- Rolifola CH, & Fitriyani K. (2023). Implementation of the Van Meter and Van Horn Zoning System Policies Model. *International Journal of Humanities Education and Social Sciences (IJHESS)*, 2(4). doi.org/10.55227/ijhess.v2i4.373
- Sailendra, & Annie. (2015). *Langkah-langkah praktis membuat SOP (Standard Operating Procedures)*. Trans Idea Publishing.
- Septyari, N.M., Adiputra, I.M.S., & Devhy, N.L.P. (2022). Tingkat stres dan mekanisme koping mahasiswa dalam penyusunan skripsi pada masa pandemi. *Jurnal Akademika Baiturrahim Jambi*, 11(1), 14. doi.org/10.36565/jab.v11i1.403
- Sidiq, U., & Choiri, Moh. M. (2019). *Metode penelitian kualitatif di bidang pendidikan* (A. Mujahidin, Ed.). CV Nata Karya.
- Sittichai, R., & Smith, P.K. (2015). Bullying in South-East Asian Countries: A review. *Aggression and Violent Behavior*, 23, 22–35. doi.org/10.1016/j.avb.2015.06.002
- Sun, R., Vuillier, L., Hui, B.P.H., & Kogan, A. (2019). Caring helps: Trait empathy is related to better coping strategies and differs in the poor versus the rich. *PLOS ONE*, 14(3), e0213142. doi.org/10.1371/journal.pone.0213142
- Syahrudin. (2019). *Implementasi Kebijakan Publik: Vol. II*. Nusa Media.
- Takizawa, R., Maughan, B., & Arseneault, L. (2014). Adult health outcomes of childhood bullying victimization: Evidence from a five-decade longitudinal British Birth Cohort. *American Journal of Psychiatry*, 777–784.
- Tresiana, N., & Duadji, N. (2021). *Implementasi kebijakan publik*. Suluh Media.
- Tuti, R. W., Murod, M., El Adawiyah, S., & Patrianti, T. (2020). An analysis of the implementation of large-scale social restrictions (PSBB) in Special Capital Region of Jakarta. *Proceedings of the International Conference on Community Development (ICCD 2020)*. doi.org/10.2991/assehr.k.201017.136
- UNICEF. (2017a). *Bullying In Indonesia: Key Facts, Solutions, and Recommendations*.
- UNICEF. (2017b). *Pencegahan perundungan (Bullying) di SMP, SMA, dan SMK panduan untuk fasilitator*. UNICEF.
- UNICEF. (2018a). *Evaluation of The Roots Indonesia peer violence and bullying prevention pilot South Sulawesi and Central Java*.
- UNICEF. (2018b, June). *Bullying: A global challenge requires a global measure*. <https://www.unicef-irc.org/article/1867-bullying-a-global-challenge-requires-a-global-measure.html>.
- UNICEF. (2021, June 1). *World health assembly resolution urges for accelerated action towards ending violence against children*. <https://www.end-violence.org/articles/world-health-assembly-resolution-urges-accelerated-action-towards-ending-violence-against>.
- Wijayanti, P., & Jannah, L.M. (2019). Implementasi kebijakan manfaat jaminan hari tua di Indonesia. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*.
- Wolke, D., Copeland, W.E., Angold, A., & Costello, E.J. (n.d.). *Impact of bullying in childhood on adult health, wealth, crime and social outcomes*. doi.org/10.1177/0956797613481608.